

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Remaja

1. Remaja Menurut Hukum

Konsep tentang “remaja”, bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang-bidang ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Di Indonesia sendiri, konsep “remaja” tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.

Hukum pidana memberikan batasan 18 tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu tetapi sudah menikah). Anak –anak yang berusia kurang dari 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun misalnya mencuri belum disebut sebagai kejahatan (kriminal) melainkan hanya disebut sebagai “kenakalan”. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi tanggung jawab negara dan di masukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus anak-anak (dibawah Departemen Kehakiman) atau dimasukkan lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya seperti Parmidi Siwi. Sebaliknya, jika usia seseorang sudah diatas 18 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, langsung ia bisa dikenai sanksi hukum pidana (dimasukkan dalam lembaga Pemasyarakatan).

Dalam hubungan hukum ini hanya Undang-Undang perkawinan saja yang mengenal konsep “remaja” walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal perkawinan untuk suatu perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974). Namun, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan orang tersebut. Baru setelah usia 21 tahun ia boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).⁸

2. Remaja Ditinjau Dari Perkembangan Fisik

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait (seperti Biologi dan ilmu faal) remaja yang dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik dimana alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono. 2004. *Psikologi Remaja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal 4-6.

pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faali alat-alat kelamin tersebut dapat berfungsi secara sempurna.⁹

3. Batasan Remaja Menurut WHO (*World Health Organization*)

WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan 3 kriteria biologik, psikologik, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi, remaja adalah suatu dimana :

- 1) Individu berkembang pada saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ini mencapai kematangan seksual;
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa;
- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri.

Sedangkan batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga yaitu, remaja awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-19 tahun).¹⁰

Lembaga Pengadilan Amerika merumuskan bahwa orang yang sering melakukan *Juveline Delinguent* (kenakalan remaja) kira-kira berumur 15 sampai 18 tahun. Untuk menggambarkan umur ini kita sering menggunakan istilah remaja. Maka dari itu pendapat - pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa batasan usia remaja adalah mereka yang berusia antara 12 sampai 22 tahun. Sehingga yang dikatakan remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Masa remaja berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria.¹¹

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat penulis definisi remaja menurut hukum, perkembangan fisik dan menurut WHO(*World Health Organization*) adalah seseorang dapat dikatakan remaja adalah manusia

⁹ *Ibid.* hal, 6-7

¹⁰ *Ibid.* hal, 9

¹¹ Made Sadhi Astuti. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Malang. Universitas Negeri Malang. Hal 11.

pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Masa remaja adalah usia dimana individu berintergrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Sedangkan dalam batasan usianya menurut WHO (*World Health Organization*) adalah 12 -24 tahun dalam ilmu psikologi rentang usia remaja terbagi menjadi 3(tiga) tahap yaitu remaja awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-19 tahun). Menurut Lembaga Pengadilan Amerika merumuskan bahwa seseorang yang sering melakukan *Juvenile Delinquent* (kenakalan remaja) diantara usia 15 -18 tahun. Untuk menggambarkan usia tersebut sering disebut dengan istilah remaja. Sehingga, dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas bahwa batasan usia remaja adalah antara 12 sampai 22 tahun. Masa remaja berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun untuk wanita dan 13 sampai 22 tahun untuk laki-laki.

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/ tingkah laku manusia dalam masyarakat.¹²

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani. 2013. *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 3.

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh *P.Topinard* (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Secara harfiah kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu “*crimes*” (kejahatan) dan “*logos*”(ilmu pengetahuan), jadi kriminologis adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan suatu kejahatan yang dilakukannya.¹³

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, *Bonger* berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. *Michael* dan *Adler* berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan *Wood* mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁴

Menurut *Moeljatno* berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.¹⁵

Menurut *Wolfgang, Savitz* dan *Johnston* dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah berketerangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi: a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, b) Pelaku kejahatan dan, c) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap

¹³ Alam.(et.al.). 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar. Hal 1.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op.cit.* hal. 12

¹⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 14.

pelakunya. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila mendapatkan reaksi dari masyarakat.¹⁶

Dari berbagai pendapat ahli diatas maka penulis dapat mendefinisikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dalam masyarakat sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi dari masyarakat atas pelanggaran hukum.

Dalam hal ini dapat disimpulkan objek kriminologi adalah apabila dalam gejala sosial yang timbul dalam masyarakat tersebut dapat melahirkan seorang penjahat, kemudian kejahatan yang dilakukannya dan mendapatkan reaksi dari masyarakat terhadap hal tersebut. Karena suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu kejahatan apabila telah mendapatkan reaksi dari masyarakat.

2. Teori-Teori Faktor Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi

Teori –teori Kriminologi terbagi kedalam 3 (tiga) perspektif, yaitu:

a. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Biologis Dan Psikologis

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada *Cesare Lombroso* (1835-1909), seorang dari Italia. Era *Lombroso* juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Para tokoh biologis dan psikologis tertarik perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani. 2013. *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 12.

kekerasan atau reaksi delinkuin, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh Biologis mengikuti tradisi *Cesare Lombroso*, *Rafaelle Garofalo* serta *Charles Goring* dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.¹⁷

b. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis

1) *Strain Theory*

Penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).¹⁸

2) *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya)

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.¹⁹

3) *Social Control* (Kontrol Sosial)

Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur

¹⁷ *Ibid.* hal 35-110

¹⁸ Alam dan AS. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal 45-46.

¹⁹ *Ibid.*

keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat tiga unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:

- a) Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
- b) Komitmen, sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- c) Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.²⁰

c. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Lainnya

Teori –teori perspektif lainnya ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai traditional explanations. Para kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model konsensus tentang kejahatan dimana semua teori sebelumnya (baik mazhab klasik maupun positif berada). Teori –teori baru ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang pembuatan dan penegakan hukum pidana tetapi juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat. Menurut teori ini kalau buatan tidak dibuat menjadi ”kriminal” oleh hukum maka tidak seorangpun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat.²¹

Dari teori diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa teori kejahatan yang dibawa oleh *Cesare Lombroso* menjelaskan kejahatan

²⁰ Travis dan Hirschi. 1969. *Causes of Delinquency* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, Hal 16-34)

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani. 2013. *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 97.

berasal dari faktor psikologis dan biologis dimana dalam faktor psikologis lebih meneliti terkait kepribadian dan kematangan mental seseorang individu terkait bagaimana kejahatan tersebut dapat berkaitan dengan kepribadian seseorang. Sedangkan dalam perspektif biologis meneliti bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh seseorang karena diwariskan. Selain aliran kriminologi diatas terdapat aliran kriminologi lain yaitu teori kejahatan dari perspektif sosiologis dimana dalam teori ini terbagi kedalam 3 (tiga) teori yaitu, *Strain Theory* dalam teori ini berpendapat bahwa suatu kejahatan dapat terjadi berdasarkan kelas sosial dimana kelas sosial menengah keatas cenderung akan melakukan suatu kejahatan dengan alasan bahwa mereka memiliki lebih banyak kekuasaan sedangkan dalam kelas sosial menengah ke bawah cenderung tidak dapat melakukan suatu kejahatan dengan alasan jika orang menengah kebawah tidak mampu untuk memenuhi kehidupannya atau dengan kata lain mereka tidak mempunyai kekuasaan seperti orang yang menengah keatas. Selain, teori diatas terdapat teori *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya) berbeda dengan *Strain Theory* dalam teori penyimpangan budaya mereka yang menengah kebawah memiliki cara tersendiri yaitu nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai mereka dari menengah keatas, sebagai konsekuensi dari nilai-nilai yang dimiliki tersebut kelas sosial menengah kebawah dapat melanggar norma-norma yang ada dilingkungan diantaranya seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Dari dua teori diatas terdapat teori yang lebih merujuk pada

Delinquency yaitu teori *Social Control* (Kontrol Sosial) dimana dalam teori ini suatu kenakalan dan kejahatan berasal dari lingkungan sosiologis orang tersebut yaitu dari faktor pendidikan, keluarga dan lingkungan pergaulannya. Selain, penjelasan kedua teori diatas terdapat teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya, teori ini menjelaskan bahwa kejahatan tidak timbul dari suatu sifat-sifat pelaku atau lingkungan sosial melainkan dari sistem hukum atau peraturan perundang-undangannya dimana suatu tindakan kriminal tidak dibuat sebagai “kriminal” maka tidak ada seorangpun yang melakukan perbuatan itu disebut sebagai seorang penjahat.

Aliran kriminologi yang dilatar belakangi dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas menurut hemat penulis bahwa perilaku yang menyimpang yang terjadi di masyarakat disebut sebagai suatu kejahatan sebagai contoh penyalahgunaan Narkotika yang sedang marak terjadi bukan hanya dalam ruang lingkup orang dewasa namun seorang remaja bahkan sampai anak-anak dapat dengan mudah mendapatkan dan menggunakan barang haram tersebut. Jika dihubungkan dengan teori kriminologi yang sesuai contoh diatas adalah teori *Social Control* (kontrol sosial) dimana dalam teori ini mengatur tingkah laku manusia yang membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat serta faktor yang melatarbelakangi dapat terjadinya suatu kejahatan yaitu dari latar belakang pendidikan, keluarga dan lingkungan pergaulannya. Jika, ketiga faktor tersebut tidak dapat

terpenuhi salah satu maka penyimpangan dalam lingkungan masyarakat akan mudah terjadi.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a. Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

Beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan "*strafbaarfeit*" atau tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

Menurut *Moeljatno*, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Menurut *Moeljatno*, yang dikutip oleh *Adam Chazawi* perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan

²² Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta .Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

²³ PAF Lamintang. 1984. *Delik-delik khusus*. Bandung. Sinar Baru .Hal.185.

²⁴ Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka cipta. Hal. 54.

- orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana yaitu ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
 - 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis dapat mendefinisikan tindak pidana adalah atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan (yang dilakukan seseorang) melanggar hukum yang dilakukannya secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya dan oleh undang-undang perbuatan tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang,²⁶ yaitu:

a) Sudut Pandang Teoritis

Maksud teoritis adalah didasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum baik penganut paham dualisme ataupun paham monisme. Unsur –unsur apa yang ada

²⁵ Dalam Adam Chazawi. *Loc. cit*

²⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. 2002. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal.79

dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Menurut *Moeljatno*, unsur tindak pidana adalah Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan ancaman orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut *R. Tresna* tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, antara lain, Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), Yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan *Moeljatno*, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan UU selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut *Vos*, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah, Kelakuan manusia, Diancam dengan pidana, Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, ialah bahwa tindak

pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam UU, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monoisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, ialah *Jonkers* dan *Schravendijk*.

Menurut, *Jonkers* (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah, Perbuatan (yang), Melawan hukum (yang berhubungan dengan), Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), Dipertanggungjawabkan.

Menurut *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut, Kelakuan (orang yang), Bertentangan dengan keinsyafan hukum, Diancam dengan hukuman, Dilakukan oleh orang (yang dapat), Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari ketiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya ada persamaannya, ialah tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.²⁷

b) Sudut Pandang Undang-Undang

Maksud sudut pandang Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan

²⁷ *Ibid.* hal,80-81

seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 (delapan) unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur objektif.²⁸

Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Sedangkan Unsur Objektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dalam pengertian objektif disini adalah tindakannya.²⁹

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah:

- a. Harus ada suatu perbuatan
Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

²⁸ *Ibid.* hal, 82

²⁹ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 16-17.

Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamtannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum.

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

- e. Harus terdapat ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau didalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.³⁰

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan jika, dilihat dari sudut pandang teoritis menurut pendapat beberapa ahli diantaranya *Moeljatno, R. Tresna, Vos* menurutnya bahwa unsur-unsur dari 3 batasan pendapat para

³⁰*Ibid.* hal, 17-18

ahli tersebut tidak ada perbedaan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya. Sedangkan, menurut *Jonkers* dan *Schravendijk* memiliki perbedaan dengan ketiga pendapat sebelumnya. Dalam pendapatnya bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan, melawan hukum, kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pendapat tersebut diperinci oleh *Schravendijk* bahwa unsur tindak pidana antara lain kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dan dipersalahkan.

Menurut hemat penulis walaupun terdapat perbedaan dari para ahli diatas, bahwasanya dalam unsur-unsur tersebut tetap memiliki persamaan yang mana persamaan tersebut tidak terlepas dari perbuatannya dan mengenai siapa yang melakukannya.

Menurut sudut pandang undang-undang penulis berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini bagaimana suatu tindak pidana atau dalam kenyataannya dapat dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu yang dibagi menjadi beberapa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Buku II KUHP mengatur kejahatan sedangkan Buku

III KUHP mengatur pelanggaran. Kemudian, dalam KUHP tersebut disebutkan 8 unsur-unsur tindak pidana dari 8 unsur terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku karena adanya suatu niat. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan dimana si pelaku tersebut harus melakukan sesuatu.

c) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu,³¹ yaitu :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*mateerieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan anatara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

³¹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal.117

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia(*delicta communia*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana propia(dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penntutan , maka dibedakan antara tindak pidana biasa(*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok(*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat(*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan(*gepriviligieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).³²

Menurut penjelasan diatas mengenai jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan kedalam 11 atas dasar-dasar tertentu. Penulis berpendapat karena dasar-dasar tersebut berdasarkan tindak pidana secara umum dan penulis mengambil kasus terkait dengan kenakalan remaja. Maka penulis mengambil kesimpulan yang dikatakan kenakalan remaja adalah seseorang pada usia-usia

³²*Ibid.* hal, 118

tertentu yaitu antara usia 12 sampai 24 tahun mereka melakukan kenalakan remaja yaitu dapat berupa penyalahgunaan Narkotika, seks bebas, tawuran dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor dalam lingkungannya kurang baik hal tersebut dapat dilatarbelakangi dari pendidikan, keluarga yang tidak harmonis dan teman dalam pergaulannya. Jika kenakalan tersebut berlanjut menjadi tindakan kriminal yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan KUHP maupun ketentuan di luar KUHP maka sebagai akibat hukumnya dapat diberikan sanksi-sanksi dalam Pasal 10 KUHP seperti penjara, kurungan, denda dan yang disebutkan lengkap didalam pasal tersebut.

b. Tinjauan Teoritis Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Kata penyalahgunaan berasal dari dua kata yaitu “salah” dan “guna” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang dapat diartikan sebagai penyelewengan penggunaan obat yang bukan untuk tujuan medis atau pengobatan, dengan kata lain penggunaan obat tidak sesuai dengan indikasinya. Penyalahgunaan (*drug abuse*) adalah penggunaan suatu zat secara berlebihan atau tidak tepat, misalnya alkohol atau obat-obat lain yang dapat mengganggu atau meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Menurut Dadang Hawari penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku (*mental and behavior disorder*) akibat penyalahgunaan Narkotika.³³

³³ Dadang Hawari. 2003. *United National Office on Drugs and Crime*. Balai Penerbit FKUI. Hal 12

Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional (kelompok yang muncul karena semakin mudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya, kelompok profesi, seperti asosiasi sarjana farmasi, ikatan dokter indonesia, dan lain-lain).³⁴

“Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan terkait Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Menurut definisi diatas penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak (tanpa pengawasan dari dokter) dan melawan hukum (tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang) yang dapat menimbulkan ketergantungan.

c. Tinjauan Teoritis Tentang Pengertian Narkotika

Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.³⁵

³⁴ Edy Karsono. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Mandar Maju. Bandung. Hal 11.

³⁵ Ibid, hal 14

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narko” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan Narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³⁷

Pengertian Narkotika menurut *Smith Kline dan French Clinical Staff* membuat definisi sebagai berikut :

“Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this difinition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meriipidin dan methadon).”

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, seperti morphin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan methadon).³⁸

Definisi lain yang di kutip *Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokai, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, hesish, cocain, dan termasuk juga

³⁶Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jakarta. Jurnal Hukum. Vol XXV. No.1. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta. Hal 441.

³⁷Ibid

³⁸Ma'roef M Ridha. 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta. Marga Bjaja. Hal 14-15.

narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen dan Stimulant*.³⁹

Menurut B. Bosu dalam buku Hari Sasangka , narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukan kedalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁴⁰

Berdasarkan dari berbagai definisi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan terkait pengertian Narkotika adalah zat (obat-obat) candu, ganja, kokai zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari bahan-bahan tersebut yakni morphin, cocain, dan heroin yang dapat menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembius dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral yang mengakibatkan pemakai mengalami rasa ketenangan, merangsang dan halusinasi.

d. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi kedalam golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

- 1) Narkotika golongan I: narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *heroin, kokain, dan ganja*.

³⁹ Djoko Prakoso. (et.al.). 2005. *Narkotika dan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Gramedia. Hal 15.

⁴⁰ Dalam Hari Sasangka. 2008. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju. Hal.135

- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *morfin* dan *petidin*.
 - 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Kodein*, *Buprenorfinopiat* dan *Etilmorfin*.
- Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3

golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semi sintetis, dan narkotika sintetis.⁴¹

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah Narkotika yang zat adiktif nya diambil dari tumbuhan- tumbuhan (alam). Contohnya , ganja, hasis,koka, dan opium.

2. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah Narkotika alami yang diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin, Kodein, Heroin dan Kokain.

3. Narkotika Sintesis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan dalam pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan Narkotika (substitusi). Contohnya, Petidin , Methadon dan Naltrexon.

Berdasarkan jenis narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun

2009 yang difokuskan terhadap masalah yang diteliti oleh penulis adalah ruang lingkup pada Pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu Narkotika Golongan I jenis Ganja.

2. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika telah menentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam

⁴¹ Subagyo Partodiharjo. 2006. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal. 12.

hubungannya dengan narkoba. Perbuatan tersebut dapat disebut dengan tindak pidana narkoba yang dapat berupa penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.

”Menurut Pasal 1 ayat 6 pengertian Peredaran Gelap dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Selain itu dalam Pasal 35 mendefinisikan Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Dalam Undang-Undang Narkoba telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkoba atau disebut sebagai pelaku pidana narkoba. Yang mana dalam peredaran gelap tersebut berkaitan dengan :

a. Produsen Narkoba

Produsen adalah kegiatan atau proses, memproduksi, menyediakan, menghasilkan dan mengubah bentuk narkoba termasuk mengkonversi atau merakit narkoba untuk diimpor dan di ekspor.⁴²

“ Menurut pengertian diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan terkait produsen narkoba yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

⁴² Tri Jata Ayu Pramesti. *Produsen , Bandar, Pengedar dan Narkoba*. [http:// www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0). diakses tanggal 01 Maret 2018

Berdasarkan pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan produsen narkoba adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan serangkaian atau kegiatan memproduksi, menyiapkan, menghasilkan dan mengubah narkoba termasuk mengkonversi atau merakit narkoba untuk diimpor dan diekspor.

b. Bandar Narkoba

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bandar memiliki arti:

1. Orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi;
2. Orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik;
3. Orang yang bermodal dalam perdagangan dan sebagai tengkulak.

Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.⁴³

c. Kurir Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kurir adalah sama dengan calo yaitu orang yg menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara, makelar.

Menurut Undang-Undang Narkoba terdapat beberapa sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo atau perantara dalam transaksi jual beli

⁴³ Ibid

narkotika. Sanksi tersebut berbeda-beda tergantung dengan jenis golongan narkotika, beratnya dan bentuknya.

d. Pengedar Narkotika

Pengedar berasal dari kata dasar 'edar'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.⁴⁴

“Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Narkotika bahwa setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.”

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan definisi pengedar narkotika adalah seseorang yang melakukan serangkaian kegiatan berupa mengedarkan, menyampaikan narkotika kepada orang yang satu ke orang lainnya baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan setiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah peredaran

⁴⁴ Ibid

narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

e. Penyalahguna Narkotika

Menurut Dadang Hawari penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku (*mental and behavior disorder*) akibat penyalahgunaan Narkotika.⁴⁵

“Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

f. Pecandu Narkotika

Kecanduan atau *addiction* dalam kamus psikologi diartikan sebagai keadaan bergantung secara fisik pada suatu obat bius. Pada umumnya, kecanduan tersebut menambah toleransi pada suatu obat bius, ketergantungan fisik dan psikologis, dan menambah gejala pengasingan diri dari masyarakat apabila obat bius dihentikan. Orang yang melakukan hal tersebut secara terus menerus dan berulang ulang sehingga menjadi kebiasaan disebut sebagai pecandu.⁴⁶

“Pengertian Pecandu Narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal

⁴⁵ Dadang Hawari. 2003. *United National Office on Drugs and Crime*. Balai Penerbit FKUI. Hal 12

⁴⁶ Chapin J.P. 2009. *Kamus Lengkap Psikologi Terjemahan Kartini Kartono*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 9

142 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁷ Berikut ini akan diuraikan tabel terkait tindak pidana narkotika serta jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku :

Tabel 1.2 Tindak Pidana Narkotika serta Jenis Sanksi Pidana
Penyalahgunaan Narkotika

No.	Bentuk Tindak Pidana Narkotika	Jenis Sanksi
1.	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman. (Pasam 111 dan Pasal 112)	1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113)	1. Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. 2. Denda antara Rp. 1 miliar s/d Rp 10 miliar
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114)	1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda antara Rp 1miliar s/d Rp 10 miliar
4.	Mengirim, mengangkut atau transit narkotika golongan I (Pasal 115)	1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
5.	Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain (Pasal 116)	1. Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. 2. Denda antara Rp. 1 miliar s/d Rp 10 miliar
6.	Jika tindak pidana pasal 116 berakibat orang lain mati atau cacat permanen	1. Pidana mati, Pidana seumur hidup, Pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda maksimum Rp 10 miliar ditambah 1/3(sepertiga)
7.	Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 117)	1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
8.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 118)	Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
9.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan III (Pasal 119)	Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
10.	Membawa, mengirim, mengangkut,	Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10

⁴⁷ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 90.

	atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 120)	tahun. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
11.	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 121)	Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
12.	Jika mengakibatkan mati atau cacat permanen (Pasal 121 ayat 2)	Pidana mati, dan Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. Denda maksimal ditambah 1/3
13.	Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122)	Pidana penjara antara 2 tahun sampai 7 tahun. Denda antara Rp. 400 juta s/d Rp 3 miliar
14.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123)	Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
15.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan III (Pasal 124)	Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
16.	Membawa, mengirim, mengangkut, atau transito narkotika golongan III (Pasal 125)	Pidana penjara antara 2 tahun sampai 7 tahun. Denda antara Rp. 400 juta s/d Rp 3 miliar
17.	Menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain (Pasal 126)	Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
18.	Jika mengakibatkan mati atau cacat permanen (Pasal 126 ayat 2)	Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. Denda maksimum ditambah 1/3
19.	Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri Golongan I Golongan II Golongan III (Pasal 127)	Pidana penjara paling lama 4 tahun Pidana penjara maksimal 2 tahun Pidana penjara maksimal 1 tahun
20.	Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sengaja tidak melapor. (Pasal 128)	Pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 1 juta
21.	Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, transito, prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. (Pasal 129)	Pidana penjara antara 4 tahun sampai 20 tahun. Denda maksimal Rp 5 miliar
22.	Jika tindak pidana narkotika dilakukan oleh korporasi (Pasal 130)	Pidana denda diperberat 3x
23.	Sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika (Pasal 131)	Pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 50 juta
24.	Percobaan atau permufakatan jalur untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. (Pasal 132)	Dipidana sesuai dengan tindak pidananya
25.	Menggunakan anak dalam tindak pidana narkotika. (Pasal 133)	Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 5 tahun

		dampai 20 tahun. Denda antara Rp 2 miliar sampai Rp 20 miliar
--	--	---

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah.⁴⁸

D. Tinjauan Tentang Modus

1. Pengertian Modus

Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian modus sendiri adalah :

1. Cara, metode;
2. Bentuk verba yang menyebabkan suasana kejiwaan berkaitan dengan perbuatan sesuai dengan tafsiran pembicaraan tentang apa yang dikatakan;
3. Nilai yang paling besar frekuensinya dalam satu deretan;
4. Angka statistik yang sering muncul dalam populasi atau sampel.

Pengertian modus operandi adalah modus yang digunakan untuk menjalankan tindak pidana.⁴⁹

Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan.⁵⁰

Pengertian lain dari modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.⁵¹

⁴⁸ Esti Aryani. 2011. *Penyalahgunaan Narkotika dan Aturan Hukumnya*. Jurnal Hukum. Vol. IX. Fakultas Hukum. Universitas Unisri. Hal. 93-94.

⁴⁹ Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English. Press Jakarta. Hal. 990.

⁵⁰ M. Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 11.

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 622.

Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan.

Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin, sekitar diterjemahkan sebagai “modus operasi”.⁵²

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/ atau memfasilitasi melarikan diri.⁵³

Berdasarkan dari pengertian kamus umum bahasa indonesia dan berbagai pendapat diatas terkait dengan pengertian modus operandi maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara,metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh remaja. Disini para pelaku menentukan suatu cara, strategi dan teknik khusus supaya lebih cepat memperoleh dan mendapatkan barang haram tersebut dengan banyak cara yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi (peredaran gelap).

E. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

1. Alasan Internal

a. Ingin tahu

Perasaan ingin tahu yang dimiliki generasi muda pada umur ketika ia masih berada dalam tahapan SD,SMP, dan SLTA. Bila dihadapan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan “nikmatnya” mengkonsumsi Narkotika, maka terdorong oleh naluri alami anak muda,

⁵² Douglas. (et.al). 2006. *Kejahatan Klarifikasi Manual (John Wiley & Sons)*. Hal 19-21.

⁵³ Vronskii. (et.al). 2004. *Berkley Books*. Hal 412.

yaitu rasa keingintahuan, keberaniannya yang dalam jiwanya didesak oleh gejolak yang ingin dianggap hebat, pemberani, dan pahlawan diantara teman-teman lainnya.

b. Ingin dianggap hebat

Perasaan ingin dianggap hebat biasanya dimiliki oleh generasi muda. Seperti yang telah di jelaskan diatas, salah satu sifat alami yang positif adalah daya saing. Namun, di zaman sekarang ini daya saing tersebut bnyak disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak yang negatif bagi generasi muda. Sebagai contoh bila daya saing tersebut di terapkan dalam hal yang negatif seperti penyalahgunaan Narkotika tentunya hal tersebut memiliki akibat yang sangat merugikan bagi generasi muda yaitu kegagalan hidup dan kesengsaraan. Karena pemakai Narkotika hanya akan dianggap hebat dalam lingkungan kecil pemakai Narkotika. Namun, dalam masyarakat luas pemakai tersebut hanya akan mendapatkan kesan yang negatif.

c. Rasa Setia Kawan

Perasaan setia kawan yang dimiliki oleh generasi muda. Jika mendapatkan penyaluran yang positif. Jika sifat positif tersebut dapat berbahaya menjadi negatif. Bila temannya memakai Narkotika, ia ikut memakai, bila temannya merokok ia akan ikut merokok, bila temannya dimarahi orang tua nya atau masyarakat ia akan ikut membela dan bersimpati. Hal seperti inilah yang dapat menyebabkan anak ikut-ikutan. Jika salah satu menggunakan Narkotika maka semuanya akan menggunakannya sehingga menjadi kawananan pengguna Narkotika.

d. Kecewa, Frustasi dan Kesal

Perasaan kecewa, frustasi dan kesal seringkali dialami oleh banyak orang terlebih adaah seorang remaja yang masih memiliki fikiran yang sangat labil. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi disekitar lingkungannya. Sebagai contoh seorang anak yang memiliki orang tua yang broken home tentunya akan merasakan hal yang sangat membuatnya kecewa, kesal dengan keadaan yang sedang dialaminya berasal dari hal itulah terkadang seorang remaja merasakan frustasi kemudian ia lepas kendali dan sesekali ia ingin merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Tidak dipungkiri dalam keadaan yang seperti itulah terkadang seseorang akan lebih mudah menggunakan Narkotika. Narkotika dapat dipakai untuk melupakan sesaat, tetapi tidak untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya.

e. Bebas Dari Rasa Sakit/Pusing

Penderita penyakit kronis yang tak kunjung sembuh misalnya kanker hati, kanker paru-paru, migren, luka tusuk, selalu merasakan sakit yang luarbiasa yang tidak dapat diatasi dengan obat sakit biasa sehingga penderitanya mencoba Narkotika. Narkotika yang dipakai hanya dapat menghilangkan rasa sakit sementara saja namun tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Dengan demikian pemakaian Narkotika dapat menimbulkan masalah baru bagi pemakainya sehingga dapat

mengakibatkan ketergantungan dengan segala komplikasi yang lebih parah.

f. Ingin Menikmati Rasa Gembira, Tampil Lincah, Enerjik dan Mengusir Rasa Sedih Dan Malas

Seseorang yang memiliki banyak kegiatan tentunya harus selalu menampilkan hal-hal yang menarik selain itu ia juga dituntut untuk selalu tampil dengan prima. Biasanya dari tuntutan tersebut menjadikan seseorang untuk memilih menggunakan Narkotika dengan alasan supaya mereka lebih gembira, tampil lincah dan energik padahal sebetulnya ia hanya menutupi rasa malu dan grogi. Perasaan hebat tersebut seharusnya dicapai melalui tekun berolahraga, hidup teratur, meningkatkan intelektual dan moralnya.

g. Ingin Tampil Langsing

Narkotika selain untuk obat penenang, penghilang rasa sakit tetapi juga dapat digunakan untuk pelangsing tubuh khususnya untuk orang yang memiliki kelebihan berat badan. Karena, Narkotika dengan jenis tertentu dapat menurunkan nafsu makan sekaligus menambah aktifitas fisik sehingga dapat menurunkan berat badan. Seharusnya, untuk menurunkan berat badan hal yang harus dilakukan adalah dengan berolahraga yang teratur, mengatur pola makan dan banyak makan sayur dan buah.

h. Takut Mengalami Rasa Sakit (sakaw)

Pengguna Narkotika yang sudah menjadi pemakai tetap akan mengalami rasa sakit (sakaw) jika ia tidak memakainya. Karena takut merasakan penderitaan tersebut, ia terus memakai Narkotika sehingga menjadi pemakai setia (junkies). Banyak pemakai Narkotika yang setia adalah orang-orang yang merasa “terpaksa” memakai, sebab kalau tidak memakai, ia akan mengalami sakaw. Dalam kondisi ini, ia tidak menikmati apa pun dari Narkotika yang di konsumsinya. Yang ia butuhkan adalah terbebas dari rasa sakit (sakaw).

2. Alasan Keluarga

Banyak pengguna Narkotika yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang seharusnya menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang, wahana silih asih, silih asah, dan silih asuh. Namun, pada kenyataannya, keluarga seringkali justru menjadi pemicu anak untuk memakai Narkotika karena keadaan keluarga itu kacau balau. Hubungan antara anggota keluarga dingin, bahkan tegang atau bermusuhan. Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih Narkotika sebagai solusi. Biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, istri sebagai benteng terakhir.

3. Alasan Orang Lain

Banyak penggunaan Narkotika yang awalnya dimulai karena pengaruh dari orang lain. Bentuk pengaruh orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari bujuk rayu, tipu daya, sampai ke paksaan.

a. Tipu Daya

Banyak anak yang ditipu oleh kenalan, teman, sahabat, atau pacar. Ia diajak memakai Narkotika dengan bermacam-macam tipuan. Narkotika disebut vitamin, obat, pil pintar, pil sehat, atau food supplement. Tipuan itu dapat juga berupa bujukan bahwa Narkotika itu tidak terlalu berbahaya kalau tahu rahasianya. Banyak orang di sekitar kita yang kita kira orang-orang baik-baik, namun ternyata pengedar Narkotika. Walaupun orang itu adalah kawan, sahabat, saudara, atau pacar, sebagai pengedar, ia akan tega menipu maupun menjebak kita. Oleh karena itu berhati-hatilah pengedar Narkotika sangat pandai memasarkan Narkotika. Ia menawarkan Narkotika sebagai vitamin, food supplement, pil sehat, pil pintar dan sebagainya. Banyak pekerja, mahasiswa, atau pelajar yang tampil loyo ketika tertipu ketika padanya ditawarkan pil sehat, vitamin, atau pil pintar. Banyak pemuka agama, juru dakwah, atau pengkotbah yang tertipu, karena “pil sehat” yang dibelinya ternyata adalah Narkotika.

b. Bujuk Rayu

Wanita cantik pengedar Narkotika biasanya menjebak” mangsa” melalui bujuk rayu. Untuk memasarkan Narkotika, pengedar tersebut memilih profesi sebagai wanita penghibur atau wanita tuna susiala (WTS). Banyak eksekutif muda, pekerja, atau bos-bos yang mulai memakai Narkotika karena rayuan pekerja seks komersial, hostess, dan sebagainya. Dalam memasarkan Narkotika, wanita tersebut merayu akan mau melayani kencan kalau bersama-sama mengkonsumsi Narkotika lebih dulu. Mula-mula korban memakai Narkotika karena tergoda, namun akhirnya menjadi terbiasa.

c. Paksaan

Banyak anak muda yang mengawali pemakaian Narkotika karena dipaksa oleh sekawanan atau seseorang yang mengancam akan mencelakainya. Banyak pelajar atau mahasiswa mengawali kebiasaan memakai Narkotika dari keadaan terpaksa, diancam oleh sekawanan preman yang menghadang ditengah jalan. Dari kelompok ini pula terjaring pemakai yang berasal dari keluarga harmonis.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.* hal, 72-79.

Berdasarkan uraian diatas yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan Narkotika kemudian penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu pada dasarnya secara garis besar terbagi menjadi ke dalam 3 faktor yaitu, 1) Alasan Internal, 2) Alasan Keluarga dan 3) Alasan Karena orang lain.

Alasan internal merupakan alasan yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri artinya mereka melakukan hal tersebut karena atas dasar kemauannya dalam hal ini dapat di pengaruhi atau disebabkan karena mereka ingin tahu, ingin dianggap hebat, rasa setia kawan, kecewa, frustrasi, dan kesal, bebas dari rasa sakit atau pusing, ingin menikmati rasa gembira, tampil lincah, energik dan mengusir rasa sedih dan malas, ingin tampil langsing, dan takut mengalami rasa sakit (sakaw).

Beberapa faktor diatas memiliki pengaruh dan akibat tersendiri terhadap setiap orang. Kemudian, alasan keluarga dimana keluarga adalah tempat paling nyaman untuk setiap orang. Namun, jika dalam lingkup keluarga tersebut mengalami ketidakharmonisan, komunikasi yang tidak baik, sampai pada akhirnya mengakibatkan broken home hal itulah yang dapat menyebabkan seseorang merasa hidupnya menjadi tertekan terlebih jika hal itu dialami oleh seseorang remaja yang masih memiliki pemikiran yang labil. Karena, akan dengan mudah ia akan lebih memilih menggunakan Narkotika untuk menenangkan dirinya. Alasan berikutnya adalah alasan orang lain adalah alasan yang berasal dari luar,

dengan berbagai trik dan modus mereka dapat dengan mudah mengelabui seseorang untuk menggunakan Narkotika.

F. Tinjauan Tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Narkotika

Metode pencegahan yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitasi. Ada bentuk pencegahan masalah Narkotika, yaitu promotif, preventif, represif, dan rehabilitasi.⁵⁵

1. Promotif (Pembinaan)

Disebut juga program pre-emptif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkotika, atau bahkan belum mengenal Narkotika. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai Narkotika. Bentuk program pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain). Pelaku program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif (Pencegahan)

Program pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal Narkotika agar mengetahui seluk beluk Narkotika sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Bentuk kegiatan seperti kampanye anti penyalahgunaan Narkotika, penyuluhan seluk beluk Narkotika, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya dan upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi Narkotika dimasyarakat.

⁵⁵ Subagyo Partodiharjo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal. 100.

3. Represif (Penindakan)

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi maupun distribusi semua zat yang tergolong Narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi program represif juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang Narkotika. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan Narkotika antara lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia , Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ kejaksaan Negeri dan Mahkamah Agung/ Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri. Banyak Narkotika di buat dari bahan kimia yang sehari-hari bermanfaat untuk kepentingan industri lain dan pertanian. Bahan –bahan yang disebut precussor tersebut dapat diramu menjadi Narkotika dan diedarkan dalam perdagangan gelap.

4. Rehabilitasi (Pemulihan)

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai Narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian Narkotika. Banyak masyarakat membuka usaha rehabilitasi korban narkotika dengan membuka pemondokan bagi penderita dan memeberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan dan atau kegiatan-kegiatan produktif, seperti olahraga, kesenian, pertanian, perbengkelan, perdagangan dan lain-lain. Usaha seperti ini sangat baik karena kemampuan pemerintahan untuk melakukannya sangat terbatas. Secara komersial, usaha pelayanan rehabilitasi korban Narkotika dapat memberikan keuntungan yang cukup baik. Masalah yang paling mendasar dan sulit dalam penanganan Narkotika adalah mencegah datangnya kambuh setelah yang penderita selesai menjalani pengobatan (detoksifikasi). Relaps disebabkan oleh perasaan rindu dan keinginan yang kuat akibat salah satu sifat Narkotika yaitu habitual. Satu-satunya cara yang dianggap efektif untuk mencegah datangnya kambuh saat ini adalah dengan rehabilitasi fisik dan mental.⁵⁶

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat penulis, mengenai pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika di bagi menjadi 4 yaitu promotif, preventif, reahabilitasi dan represif. Dimana dalam setiap metode pencegahan

⁵⁶ Ibid. hal, 100-107

tersebut terbagi sesuai dengan perannya masing-masing. Metode pencegahan yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah rehabilitasi.

